

**ANALISIS KEBIJAKAN UJIAN AKHIR PENDIDIKAN DINIYAH
FORMAL BERSTANDAR NASIONAL/IMTIHAN WATHANI DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**(Studi Kasus Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama Republik Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun Oleh

ARUM WARDATUL HUSNA ASYAUQIYA

NIM : 1910490035

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arum Wardatul Husna Asyauqiya

NIM : 19104090035

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul Analisis Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/Imtihan Wathani Dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah hasil karya atau penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Yang Menyatakan



Arum Wardatul Husna Asyauqiya

NIM. 19104090035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arum Wardatul Husna Asyauqiya

NIM : 19104090035

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Starta Satu saya) seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Dengan demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Yang menyatakan



Arum Wardatul Husna Asyauqiya
NIM 19104090035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

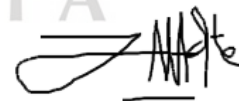
Nama : Arum Wardatul Husna Asyauqiya
NIM : 19104090035
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan (S.Pd.).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2023
Pembimbing Skripsi



Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
19650523 199103 2 010

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/____/PP.00.91/_____/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN UJIAN AKHIR PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL BERSTANDAR NASIONAL/IMTIHAN WATHANI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(Studi Kasus Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARUM WARDATUL IHUSNA ASYAUQIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 19104090035
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketma Silang
Dra. Wiji Hidayati, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6482d8938849



Penguji I
Dr. Subiyantoro, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6482d904b5a05



Penguji II
Rinduan Zain, S.Ag, MA.
SIGNED

Valid ID: 6482d89221875



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Prof. Dr. Hj. Sri Sumarmo, M.Pd
SIGNED

Valid ID: 6482d8180f3ee

ST. I. A. UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

(Surat Al-Kahfi:84)¹

Artinya : Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Kemenag RI, “Qur’an Kemenag,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

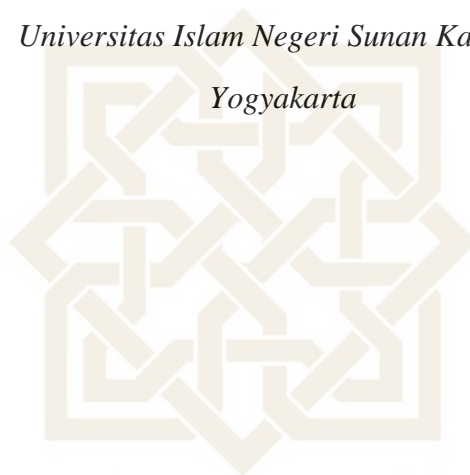
Almamater tercinta

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* Dalam Sistem Pendidikan Nasional” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penelitian dan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Manajemen Pendidikan Islam dan merupakan kesempatan berharga sekali untuk menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam situasi dunia nyata. Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta dukungan semangat dari beberapa pihak, tentunya skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana bentuk saat ini.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Prof. Dr. Sri Sumarni, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan pengarahan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Zainal Arifin, M.S.I., selaku Kepala Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
4. Ibu Dra. Wiji Hidayati, M.Ag selaku Dosen Pembimbing, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan banyak saran, ide, kritik, dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ibu, apabila penulis masih banyak kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja kepada ibu.
5. Bapak Prof. Dr. Subiyantoro, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam menempuh Pendidikan di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
6. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan material serta doa sejak lahir hingga saat ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu serta kakak ku Lintang dan adikku Zidni yang selalu mendukung penulis dalam suka dan duka proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman seperjuangan, semua rekan angkatan 2019 Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang selalu kita bagi selama ini.
8. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data pendukung mengenai penelitian penulis.

Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, juga penulisa sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga, karena dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya maka skripsi ini dapat diselesaikan penulisannya dengan baik.

Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semuanya dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai, Amiin.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Penulis,



Arum Wardatul Husna Asyauqiya

19104090035



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Arum Wardatul Husna Asyauqiya, *Analisis Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/Imtihan Wathani Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Studi Kasus Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama Republik Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta : Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Tahun 2018 Pemerintah menyelenggarakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional (UAPDFBN)/*Imtihan Wathani* (IW) sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Tujuan dibuatnya kebijakan untuk mengukur kemampuan dan penguasaan santri terhadap pembelajaran pada PDF.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan UAPDFBN/IW dalam sistem pendidikan nasional selama program ini dijalankan. Menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan observasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia.

Terdapat tiga hal yang difokuskan dalam penelitian ini berdasarkan teori analisis kebijakan William N. Dunn yaitu : Masalah Sosial yang melatarbelakangi diadakannya kebijakan UAPDFBN/IW, Implementasi kebijakan UAPDFBN/IW dan konsekuensi dari dibuatnya kebijakan UAPDFBN/IW. Hasil dari penelitian ini masalah sosial yang melatarbelakangi kebijakan UAPDFBN adalah Perlunya standarisasi pendidikan pada satuan PDF. Dalam proses implementasi digunakan konsep George C Edward III yang mengemukakan empat faktor dalam implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan UAPDFBN/IW. Keempat implementasinya telah berjalan dengan baik kecuali Sumber Daya manusia dan sarana prasarana yang perlu diperbaiki. Terakhir konsekuensi dari kebijakan berupa konsekuensi positif dan negatif. Konsekuensi positif berupa kepercayaan diri santri karena mendapat ijazah yang sah. Bagi pemerintah dimilikinya standarisasi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada pada satuan PDF. Konsekuensi negatif dari kebijakan UAPDFBN/IW adalah munculnya beberapa kendala dan masalah yang harus diperbaiki dalam setiap pelaksanaan kebijakan UAPDFBN/IW.

Kata kunci : Analisis kebijakan,Ujian Akhir Pendidikan Nasional Berstandar Nasional/ *Imtihan Wathani*, Pendidikan Nasional.

ABSTRACT

Arum Wardatul Husna Asyauqiya, Policy Analysis of Final Examinations for Formal Education with National Standards/Imtihan Wathani in the National Education System, Case Study of the Directorate of Early Education and Islamic Boarding Schools, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Thesis. Yogyakarta: Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training Sciences, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

In 2018 the Government held the Final Examination for National Standard Formal Diniyah Education (UAPDFBN)/Imtihan Wathani (IW) in accordance with the Mandate of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and Regulation of the Minister of Religion Number 31 of 2020 concerning Islamic Boarding School Education. The purpose of making policies is to measure students' abilities and mastery of learning in PDF.

This study aims to analyze the implementation of UAPDFBN/IW policies in the national education system during the implementation of this program. Using a qualitative approach supplemented by observation, documentation and semi-structured interviews at the Directorate of Early Education and Islamic Boarding Schools of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

There are three things that are focused on in this research based on William N. Dunn's theory of policy analysis, namely: Social problems behind the holding of the UAPDFBN/IW policy, Implementation of the UAPDFBN/IW policy and the consequences of making the UAPDFBN/IW policy. The results of this research are the social problems that lie behind the UAPDFBN policy, namely the need for standardization of education in PDF units. In the implementation process, the concept of George C Edward III was used which put forward four factors in policy implementation, namely: communication, resources, attitudes and bureaucratic structure that influenced the success or failure of the UAPDFBN/IW policy. The four implementations have gone well except for human resources and infrastructure that need to be improved. Finally, the consequences of the policy are in the form of positive and negative consequences. The positive consequence is the self-confidence of students because they get a valid diploma. For the government, it has standardized education in the implementation of learning in PDF units. The negative consequences of the UAPDFBN/IW policy are the emergence of several obstacles and problems that must be corrected in every implementation of the UAPDFBN/IW policy.

Keywords: Policy analysis, Final Examination of National Education with National Standards/Imtihan Wathani, National Education.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Kebijakan.....	18
2. Pengertian Analisis Kebijakan	19
3. Tahap pengambilan kebijakan.....	22
4. Bentuk-bentuk analisis	25
5. Gaya Analisis Kebijakan	27
6. Implementasi Kebijakan	29
7. Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/ <i>Imtihan Wathani</i>	34
F. Metode penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Model Penelitian.....	39

3. Tempat dan Waktu Penelitian	40
4. Subjek Penelitian	41
5. Teknik Pengumpulan Data	43
6. Teknik Analisis Data	47
7. Uji Validitas Data	50
G. Sistematika Pembahasan	51
BAB II GAMBARAN UMUM	53
A. Profil Kementerian Agama Republik Indonesia	53
1. Letak Geografis	53
2. Sejarah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.....	53
3. Visi dan Misi	54
4. Struktur Organisasi	55
B. Profil Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.....	56
1. Sejarah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	56
2. Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.....	58
3. Tugas dan Fungsi.....	59
4. Layanan Publik.....	60
C. Sejarah Pendidikan Diniyah Formal (PDF).	60
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN UJIAN AKHIR PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL BERSTANDAR NASIONAL/IMTIHAN WATHANI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.....	65
A. Analisis Proses Formulasi Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/ <i>Imtihan Wathani</i>	65
1. Perumusan Masalah.....	65
2. Peramalan (<i>Forecasting</i>)	71
B. Analisis Proses Implementasi Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/ <i>Imtihan Wathani</i>	74
1. Rekomendasi Kebijakan	74
2. Implementasi Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Pendidikan Formal Berstandar Nasional	76

C. Analisis Proses Evaluasi Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/ <i>Imtihan Wathani</i>	99
1. Evaluasi Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/ <i>Imtihan Wathani</i>	99
2. Dampak positif dari kebijakan ini adalah sebagai berikut :.....	104
3. Kendala dan Masalah Pada Implementasi Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/ <i>Imtihan Wathani</i> ..	107
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
C. Kata Penutup.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
Lampiran-lampiran	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peningkatan Jumlah Peserta UAPDFBN/IW	8
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Ustadz Satuan PDF	83
Tabel 3 Model dan waktu Penyelenggaraan UAPDFBN/IW	94
Tabel 4 Realisasi Peserta UAPDFBN/IW 2021	101
Tabel 5 Realisasi Peserta UAPDFBN/IW 2022	101
Tabel 6 Rekapitulasi Nilai UAPDFBN/IW 2021	102
Tabel 7 Rekapitulasi Nilai UAPDFBN/IW 2022	103
Tabel 8 Diferensiasi data UAPDFBN/IW 2023	111
Tabel 9 Jadwal Pelaksanaan CBT dan PBT UAPDFBN/IW	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Analisis Kebijakan William N. Dunn	21
Gambar 2 Proses Kebijakan Ideal	25
Gambar 3 Struktur Organisasi Kemenag RI	55
Gambar 4 Bentuk-Bentuk Pendidikan Formal.....	61
Gambar 5 Postingan Instagram Pendidikan Pesantren Kemenag RI	78
Gambar 6 Koordinasi Simulasi CBT UAPDFBN/IW 2023	80
Gambar 7 Sosialisasi oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.....	81
Gambar 8 Sarana dan Prasarana UAPDFBN/IW.....	87
Gambar 9 Ucapan Selamat oleh Menteri Agama RI.....	91
Gambar 10 Lulusan PDF yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri	106
Gambar 11 Mekanisme Pendataan Emis.....	109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Instrumen Penelitian.....	124
Lampiran II	: Data Dokumentasi.....	127
Lampiran III	: Foto Dokumentasi	128
Lampiran IV	: Surat Penunjukan DPS	137
Lampiran V	: Surat Bukti Seminar Proposal	138
Lampiran VI	: Surat Permohonan Izin Penelitian	139
Lampiran VII	: Surat Keterangan Penelitian.....	140
Lampiran VIII	: Kartu Bimbingan Skripsi.....	141
Lampiran IX	: Sertiifikat IKLA	142
Lampiran X	: Sertifikat TOEFL.....	143
Lampiran XI	: Sertifikat Sospem	144
Lampiran XII	: Surat Keterangan Plagiasi.....	145
Lampiran XIII	: Sertifikat PLP-KKN	146
Lampiran XIV	: Sertifikat ICT.....	147
Lampiran XV	: Curriculum Vitae.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tolak ukur sebuah negara atau bangsa yang maju dapat dilihat dari pendidikan yang dimiliki. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting terkait dengan keberlangsungan sebuah negara dalam menyelesaikan masalah kenegaraan baik dalam bidang ekonomi, budaya, agama, kesehatan dsb. Pendidikan merupakan sebuah kunci utama demi tercapainya tujuan suatu negara karena asal mula dari semua kebutuhan negara berdasarkan pengetahuan yang memadai.²

Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dalam bidang pendidikan. Salah satu nya adalah perkembangan meliputi tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan informal digambarkan sebagai pendidikan yang berasal dari lingkungan terdekat terutama keluarga, pendidikan formal adalah pendidikan berjenjang yang dilakukan pada institusi resmi yang terstruktur terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Keberadaan tiga jalur

²Suhela Yanti, "Analisis Kebijakan Pendidikan," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>.

pendidikan tersebut diharapkan dapat memperluas dunia pendidikan, sehingga proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada sistem persekolahan.³

Tiga jalur pendidikan ini diposisikan saling melengkapi, semua orang memiliki kebebasan dalam memilih jalur pendidikan yang dibutuhkan. Dan dari segi pemerintah terus meningkatkan perhatiannya dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan berjalannya waktu ketiga jalur ini telah mengalami banyak perkembangan terutama pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Salah satunya pada pendidikan formal muncul banyak lembaga persekolahan mulai dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi. Begitu juga pada jalur pendidikan nonformal terutama yang berbentuk lembaga pesantren yang juga mengalami perkembangan begitu pesat.⁴

Laporan dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa per April 2022, jumlah pondok pesantren di Indonesia adalah 26.975 pondok pesantren.⁵ Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengakar (*indigenous*) dalam masyarakat muslim Indonesia, telah mampu menjaga dan memelihara keberlangsungannya (*survival system*) selama perjalanannya dan memiliki model pendidikan yang multi aspek. Santri tidak hanya dididik untuk menjadi religius, tetapi juga memperoleh tempaan kepemimpinan alami,

³ Ahmad Darlis, "Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan," *Jurnal Tarbiyah* XXIV, no. 1 (2017): 91–93.

⁴ Ahmad Syukron, Samsudi Samsudi, and Kustiono Kustiono, "Pendidikan Diniyah Formal : A Formal Curriculum for Pesantren in Indonesia," *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology* 9, no. 2 (2020): 63–71, <https://doi.org/10.15294/ijcet.v9i2.36645>.

⁵ Dimas Bayu, "Data Pesantren per April 2022," *DataIndonesia.id*, 2022, <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/indonesia-miliki-26975-pesantren-ini-sebaran-wilayahnya>.

kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, solidaritas, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Modal tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri sebagai wujud partisipasi pesantren yang berhasil dalam tujuan pembangunan negara dan berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁶

Pesantren yang pada mulanya merupakan aktivitas keagamaan atau berupa pengajian kitab kuning yang diadakan di masjid, musholla atau majelis taklim, dengan sistem adat sederhana tanpa ada tingkatan kelas apapun.⁷ Dalam hal ini, pesantren mampu mengembangkan dan keberadaannya diakui di bawah pengawasan Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan. Hal ini dikarenakan fokus pesantren pada pengajaran yang berkaitan dengan bidang keagamaan.⁸

Berkembangnya pendidikan di Indonesia, dimana pendidikan telah menjadi kebutuhan utama untuk mewujudkan masa depan, masyarakat menjadi semakin kritis dalam memilih jalur pendidikan. Sebagian besar percaya bahwa mayoritas lulusan pesantren masih kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri yang bergengsi dan bersaing di dunia kerja.⁹ Kondisi tersebut tentu memberi dampak pada perkembangan pesantren, menurut Afandi (2019:56), realita yang ada

⁶ Muhammad Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," *Al Hikmah* XIV, no. 1 (2013): 101–19.

⁷ H.M. Ridwaln Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.).

⁸ Zuhdi Muhammad, "Modernization of Indonesia Islamic Schools' Curricula, 1945-2003," *Internasional Journal of Inclusive Education*, Vol.10, No. 4-5, n.d., 415–427.

⁹ P. Nilan, "The 'Spirit of Education' in Indonesia Pesantren," *British Journal of Sociology of Education* Vol. 30 (n.d.): 219–232.

dilapangan membuat banyak pesantren yang dulunya nonformal memperbarui diri menyesuaikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya keagamaan yang berkembang sekarang, agar para lulusannya mendapat kesetaraan yang sama dimata masyarakat.¹⁰ Menindaklanjuti masalah tersebut pemerintah memberikan perhatian kepada pesantren dengan memberikan porsi yang sama antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan agama Islam seperti pesantren. Dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren tercantumlah sebuah layanan pendidikan baru yaitu Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang merupakan wajah baru pendidikan pesantren.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pendidikan Diniyah Formal atau sering disebut (PDF) merupakan Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. Selain itu pendidikan diniyah formal juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pendidikan oleh pesantren yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Nasional.¹¹

Salah satu alasan penyelenggaraan PDF ini adalah kurangnya lulusan pendidikan umum baik dari sekolah (pendidikan umum murni) maupun madrasah (pendidikan umum berciri khas islam), dalam hal ini kebanyakan orang berpikir bahwa pendidikan tersebut belum cukup mampu untuk melahirkan *mutafaqqih fiddin* (spesialis di bidang ilmu agama Islam). Oleh

¹⁰ Afandi Zaenal, "Strategi Pendidikan Entrepreneurship di Pesantren Al-Mawaddah Kudus," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2019, 55–69.

¹¹ Dalinama Telaumbanua, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," no. 006344 (2019), <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.

karena itu, pendidikan diniyah formal merupakan solusi alternatif yang dapat menjadi wajah baru model pendidikan pesantren, yang bertujuan untuk menghasilkan kader ulama' yang berilmu, profesional, moderat, dan berakhlakul karimah. Keberadaan PDF menunjukkan adanya regenerasi pendidikan di pesantren dari sistem madrasah diniyah non formal ke sistem pendidikan diniyah formal.¹² Keadaan ini membuat pondok pesantren yang menyelenggarakan PDF perlu memperhatikan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum (KDSK) sebagai acuan kegiatan pendidikan diniyah formal dan untuk menjaga kualitas lulusan dari satuan PDF.¹³

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yang dikembangkan oleh pendidikan diniyah formal mencakup kurikulum pendidikan umum dan kurikulum pesantren berdasarkan Kitab Kuning (*kutub al turats*). KDSK PDF dirancang dengan menyesuaikan jenjang pendidikan formal, yang dimulai dari jenjang pendidikan dasar yang disebut PDF Ula 6 (enam) tahun, pendidikan menengah pertama yang disebut PDF Wustha 3 (tiga) tahun, dan pendidikan sekolah menengah atas yang disebut PDF Ulya 3 (tiga) tahun. Mata pelajaran umum juga diajarkan 25% dari semua mata pelajaran. Dari struktur kurikulum tersebut dapat dinyatakan bahwa kurikulum yang diterapkan pada pendidikan diniyah formal adalah kebalikan dari kurikulum madrasah, jika di madrasah

¹² Syukron, Samsudi, and Kustiono, "Pendidikan Diniyah Formal : A Formal Curriculum for Pesantren in Indonesia."

¹³ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, "Dokumen Petunjuk Teknis Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal," Pub. L. No. 4412 (2022).

ilmu umum 75% dan ilmu agama 25%, maka pada pendidikan diniyah formal justru sebaliknya yaitu 75% ilmu agama dan 25% ilmu umum.¹⁴

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka disusunlah kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi pembelajaran dan metode. Kurikulum digunakan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Salah satu cara untuk melihat tingkat pencapaian akhir pendidikan, diperlukan adanya suatu bentuk evaluasi. Dengan demikian evaluasi pendidikan adalah salah satu komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dari rencana pendidikan. Namun pada dasarnya tidak semua evaluasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang ditentukan. Hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk pengukuran adalah jika menggunakan alat evaluasi yang sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan yang ditentukan.¹⁵

Salah satu alat evaluasi untuk mengukur tingkat capaian kompetensi santri PDF adalah Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional (UAPDFBN) atau biasa disebut *Imtihan Wathani* (IW) yang merupakan amanah dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan menteri agama nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Munculnya kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar

¹⁴ Abdul Wahid, "Pendidikan Diniyah Formal Wajah Baru Pendidikan Pesantren Untuk Kaderisasi Ulama'," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam - SYAIKHUNA* 7, no. 2 (2016): 292 – 302, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3078>.

¹⁵ Sartina, Nursiang, and Faisal, "Analisis Kebijakan Ujian Nasional Terhadap Evaluasi Akhir Pendidikan," *Jurnal Mappesona* 3, no. 2 (2020): 1–18, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/831/563>.

Nasional/*Imtihan Wathani* merupakan upaya Kementerian Agama untuk mengukur kemampuan dan penguasaan santri terhadap kurikulum yang berbasis Kitab Kuning yang mengacu pada Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum (KDSK) Pendidikan Diniyah Formal (PDF).¹⁶

Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* juga merupakan salah satu syarat kelulusan dari satuan pendidikan diniyah formal ini, yaitu Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinyatakan bahwa santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan, dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik satuan pendidikan diniyah formal, dan penilaian oleh Menteri dilakukan melalui Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*.¹⁷

Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* pertama kali dilakukan pada tahun 2018 dan sudah berlangsung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁶ Direktur Jendral Pendidikan Islam, Dokumen Petunjuk Teknis Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal. Pub. L. No. 4412 (2022).

¹⁷ Direktur Jendral Pendidikan Islam. Dokumen Petunjuk Teknis Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal. Pub. L. No. 4412 (2022).

selama 5 tahun, dan pada tahun 2023 berjalan tahun ke 6, Berikut grafik peningkatan data peserta dari tahun ke tahun :



Tabel 1 Peningkatan Jumlah Peserta UAPDFBN/IW

Dari grafik data diatas menunjukkan terjadinya peningkatan peserta dan lembaga pada setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2018 sejumlah 827 santri dan terus meningkat sampai tahun 2022 sebanyak 6219 santri. Selaras dengan adanya peningkatan dari sisi jumlah peserta dan model yang digunakan pada Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/Imtihan *Wathani*, Kementerian agama menemukan beberapa masalah yang ada dalam penyelenggaraan selama 5 tahun belakangan ini. Pada acara Koordinasi Simulasi CBT UAPDFBN/IW dijelaskan oleh Aziz Sholeh, ST.M.Si selaku Sub Koordinator Data dan SI Bidang PAKIS di Hotel Padjajaran Suites Resort & Convention Hotel Bogor hasil dari evaluasi beberapa masalah pada tahun sebelum-sebelumnya, seperti adanya kendala diferensiasi data peserta ujian, Pelaksanaan ujian yang belum menyeluruh menggunakan Computer Base Test

(PBT), jaringan di beberapa daerah yang kurang memadai serta sebaran hasil nilai yang masih dibawah standar.¹⁸ Menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren evaluasi yang bisa dilakukan diantaranya perbaikan terhadap standar input, proses, maupun output. Pemerintah berharap dengan adanya evaluasi yang diadakan dapat memperbaiki pemberlakuan kebijakan ini kedepannya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dalam implementasinya mengalami masalah kebijakan dimana faktor penyebab masalah dapat ditinjau dari berbagai dimensi, sebagai contoh sederhana dapat terjadi karena kekurangan dalam proses perumusan kebijakan dan programnya, kurangnya dukungan anggaran, kurangnya koordinasi dan sosialisasi dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dlsb. Melihat pentingnya bagaimana kebijakan ini telah diterapkan selama 5 tahun, dengan beberapa progres yang ada, maka dirasa penting dilakukan penelitian untuk mengupas analisis kebijakan evaluasi pendidikan dalam Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan formal di Indonesia dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

Lokasi dalam penelitian ini terdapat di Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu pada Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly Direktorat

¹⁸ Agung Laksono, "Hasil Koordinasi Simulasi CBT IUAPDFBN/IW," di *Padjajaran Suites Resort & Convention Hotel Bogor*, 2022.

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dalam hal ini lembaga tersebut sebagai perumus, penyusun, pengkoordinasi dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*, sehingga dirasa tepat dilakukan penelitian di Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Permasalahan sosial apa yang melatarbelakangi dibuatnya Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*?
3. Apa konsekuensi dari dibuatnya kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui permasalahan sosial apa yang melatarbelakangi dibuatnya Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*.
- c. Untuk mengetahui konsekuensi dari adanya kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*.

2. Manfaat penelitian

Manfaat teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini akan menghasilkan karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai analisis kebijakan berupa Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* sebagai sumbangan teoritis bagi perkembangan kajian ilmu pendidikan.

Selain itu, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat yang baik sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam perkembangan kajian ilmu pendidikan serta dapat memberikan dukungan terhadap penelitian sejenis.
- b. Bagi lembaga khususnya Kementerian Agama sebagai pengambil keputusan kebijakan dapat dijadikan sebagai masukan positif dalam usaha meningkatkan pengembangan

dan menyukseskan program Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan formal di Indonesia.

- c. Bagi masyarakat dapat menjadi informasi baru mengenai kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi penyenggaraan kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang tersaji dibagian ini dimaksudkan sebagai gambaran terhadap penelitian terdahulu atau sebelumnya, Pada bagian ini pula terdapat pembahasan mengenai posisi peneliti diantara karya-karya yang telah ada. Sejauh yang peneliti ketahui belum ada karya ilmiah dan penelitian yang sudah ditulis berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*, namun lebih banyak mengenai Evaluasi Pendidikan berupa Ujian dan menenai lembaga pelaksana kebijakan berupa Pendidikan Diniyah Formal, diantaranya yaitu:

1. Penelitian Sartina, Nursiang, Faisal (2020) dengan judul Analisis kebijakan Ujian Nasional terhadap evaluasi akhir pendidikan. Pada penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan mengenai evaluasi pembelajaran yang berbentuk Ujian Nasional. Hasil penelitian tersebut

menjelaskan mengenai pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif, sementara penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Kesamaan penelitian Sartina, Nursiang, Faisal dengan penelitian ini adalah mengenai analisis kebijakan pada ujian, fokus pada penelitian Sartina, Nursiang dan faisal adalah analisis kebijakan Ujian Nasional yang bertujuan untuk evaluasi pembelajaran sedangkan pada penelitian ini analisis kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* untuk pengukuran tingkat pencapaian kompetensi lulusan santri.¹⁹

2. Penelitian Suroso (2017) tentang Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut adalah manajemen pembelajaran yang ada di PDF Assalafi Al Fithrah telah terlaksana dengan baik dengan adanya perencanaan tujuan, materi pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, alokasi waktu dan jenis evaluasi. Jenis evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada Pesantren ini adalah Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*. Kekurangan yang dirasakan oleh PDF Assalafi Al Fitrah pada manajemen pembelajaran adalah mengenai hambatan dalam aspek

¹⁹ Sartina, Nursiang, and Faisal, "Analisis Kebijakan Ujian Nasional Terhadap Evaluasi Akhir Pendidikan," *Jurnal Mappesona* 3, no. 2 (2020): 1–18, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/831/563>.

penilaian berupa tidak adanya struktur penilaian yang relevan, upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah mengadakan program pembinaan dan pengembangan kurikulum.

Pembinaan kurikulum merupakan upaya dalam menjaga dan mempertahankan kurikulum agar berjalan sesuai tujuan, untuk melihat apakah tujuan tersebut sudah berjalan atau belum, maka dibuatlah evaluasi pembelajaran yang terstruktur dan relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Suroso tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian mengenai pendidikan diniyah formal. Namun, fokus penelitian Suroso pada manajemen pembelajaran sedangkan penelitian ini pada analisis kebijakan berupa evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk pengukuran tingkat pencapaian kompetensi lulusan santri, yaitu Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* yang ada pada pendidikan diniyah formal.²⁰

3. Penelitian oleh Ucu Kurniawan (2020) mengenai Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru, dijelaskan mengenai bagaimana peran dan kendala fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* pada kegiatan manajemen kurikulum PDF di Pondok Pesantren Al-Munawwarah, dari hasil penelitian yang diadakan terkait kualifikasi

²⁰ Suroso Suroso, "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fitrah Surabaya," *Adabiyah : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.21070/ja.v1i3.1237>.

pendidikan guru–gurunya belum terlaksana dengan baik, masih ada guru yang belum tamat Strata 1 atau hanya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), begitu pula mengenai Penyusunan Kurikulum yang masih mengalami kendala karena dalam penyusunan hanya mengulang dokumen perencanaan Kurikulum yang sudah ada.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* mengenai ketersediaan dana yang mempengaruhi terpenuhinya sarana prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran. Jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka semua kegiatan pembelajaran akan terkendala, termasuk kegiatan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* yang dalam hal ini penanggung jawab mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk ujian diserahkan pada lembaga yang mengadakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*. Selain itu jika kualifikasi guru yang belum memenuhi syarat serta perencanaan kurikulum yang belum mengikuti Kompetensi Dasar dan Kerangka Kurikulum yang telah ditentukan maka masalah – masalah ini pasti akan berpengaruh terhadap sistem pembelajaran yang dapat berimbas kepada hasil dari Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* yang kurang memuaskan.²¹

²¹ Kurniawan, “Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (Pdf) di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru,” 2020, [http://repository.uin-suska.ac.id/29644/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29644/1/tesis ucu kurniawan ok.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/29644/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29644/1/tesis%20ucukurniawanok.pdf).

4. Penelitian oleh Ina Magdalena, Hadana Nur Fauzi, dan Raafiza Putri Universitas Muhammadiyah Tangerang (2020) tentang pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dan akibat memanipulasinya. Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran evaluasi merupakan salah satu komponen penting, evaluasi merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Sistem evaluasi yang baik akan menghasilkan gambaran mengenai kualitas pembelajaran. Persamaan antara penelitian Ina Magdalena, Hadana Nur Fauzi, dan Raafiza putri dengan penelitian ini terletak pada pembahasan evaluasi dalam pembelajaran. Adapun perbedaannya adalah mengenai bentuk evaluasi, pada penelitian tersebut evaluasi pembelajaran menggunakan metode kuesioner, studi kasus, observasi, anecdotal records dan wawancara, yang masing-masing dilengkapi dengan instrumen penilaian tertentu.²²
5. Penelitian oleh Yulia Indahri (2021) mengenai Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional, pada penelitian ini dijelaskan mengenai model evaluasi pendidikan di Indonesia yang baru yaitu Assessment Nasional (AN) sebagai evaluasi mutakhir terhadap sistem pendidikan nasional, seperti yang kita ketahui Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan model evaluasi, dan terakhir pada

²² Ina Magdalena, Hadana Nur Fauzi, and Raafiza Putri, "Pentingnya Evaluasi dalam Pembelajaran dan Akibat Memanipulasinya," *Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, no. 2 (2020): 244–57, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.

tahun 2020 berupa Ujian Nasional yang berubah menjadi Assessment Nasional, perubahan ini dilakukan karena adanya evaluasi terhadap program Ujian Nasional yang bertepatan dengan pandemi covid-19.²³

Hasil dari Assessment Nasional menjadi cerminan atau potret layanan kerja setiap sekolah untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat dilakukan refleksi guna mempercepat perbaikan mutu pendidikan. Tujuan dari penulisan Yulia Indahari ini adalah untuk melihat apakah Assessment Nasional telah menjadi pilihan yang tepat untuk mengevaluasi sistem pendidikan saat ini. Persamaan antara penelitian Yulia Indahari dengan penelitian ini adalah pada tujuan penelitian yaitu sama-sama membahas efektivitas kebijakan penyelenggaraan Assessment Nasional maupun Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*. Melihat apakah hasil dari kebijakan pendidikan ini dapat menjadi salah satu alat evaluasi yang tepat pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.²⁴

E. Kerangka Teori

Dalam sub bab ini akan dibahas teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan tema penelitian. Disini penulis akan memaparkan teori dan konsep dari

²³ Yulia Indahari et al., "Asesmen Nasional Sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional National Assessment as a Choice of Evaluation to National Education System," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* / 12, no. 2 (2021): 2614–5863, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>.

²⁴ Yulia Indahari et al., "Asesmen Nasional Sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional National Assessment as a Choice of Evaluation to National Education System," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* / 12, no. 2 (2021): 2614–5863, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>.

para ahli terkait dengan analisis kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dalam Pendidikan Nasional.

1. Pengertian Kebijakan

Secara terminology makna kebijakan yang didefinisikan oleh para ahli diantaranya Carter V. Good (1959) menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu proses dimana pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil dalam pelaksanaannya. Hough memberikan kontribusi yang berarti mengenai isu-isu konseptual dan teoritik yang mampu memberikan kerangka pemahaman yang jelas pada analisis kebijakan. Menurut Hough kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana, usulan program-program, keputusan-keputusan, memunculkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang maupun peraturan-peraturan.²⁵

Bertolak dari konseptualisasi tersebut, Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* merupakan bentuk dari kebijakan, yaitu kebijakan mengenai evaluasi pendidikan, Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* bisa dikategorikan sebagai kebijakan karena : (1) memiliki tujuan jelas untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan (3) merupakan program pemerintah (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak

²⁵ Carter V. Good, *Dasar Konsep Pendidikan Moral* (Alfabeta, 1977).

dan atau konsekuensi (6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga terkait (Rahardjo 2010).²⁶

2. Pengertian Analisis Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis diartikan sebagai kegiatan mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan dan menyusun komponen-komponennya untuk dikaji secara detail. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan tujuan yang menjadi pedoman dasar rencana dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini biasa diterapkan pada suatu pemerintahan, organisasi, kelompok, maupun individu. Definisi yang menekankan pada maksud dan tujuan dikemukakan oleh James E Anderson “*A purpose a course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem of matter of concern*”. (kebijakan adalah arah yang mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh individu maupun kelompok dalam mengatasi suatu permasalahan).²⁷ Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang disusun secara sistematis untuk memahami substansi kebijakan agar mendapat Informasi yang jelas tentang substansi dari kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan.

²⁶ Yanti, “Analisis Kebijakan Pendidikan,” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>

²⁷ Irfan Islamy, “Definisi Dan Makna Kebijakan Publik,” *ADPU4410/Modul 1*, 2014, 1–41.

Analisis kebijakan pendidikan dirasa penting sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraannya pasti tidak lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah atau pihak yang mempunyai wewenang pada suatu lembaga pendidikan tersebut berupa lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Dengan dilakukannya analisis kebijakan, kita dapat mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai penanggungjawab pendidikan. Kebijakan merupakan modal utama pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Cakupan umum dan metodologi analisis kebijakan bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.²⁸ Kebijakan yang telah dikembangkan dan diimplementasikan menghasilkan konsekuensi, bentuk konsekuensinya bisa positif atau negatif. Analisis kebijakan memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan masalah kebijakan, prakiraan yang relevan dengan kebijakan, saran atau rekomendasi yang mungkin berguna untuk kebijakan, deskripsi, atau pemantauan dan evaluasi Kebijakan.²⁹

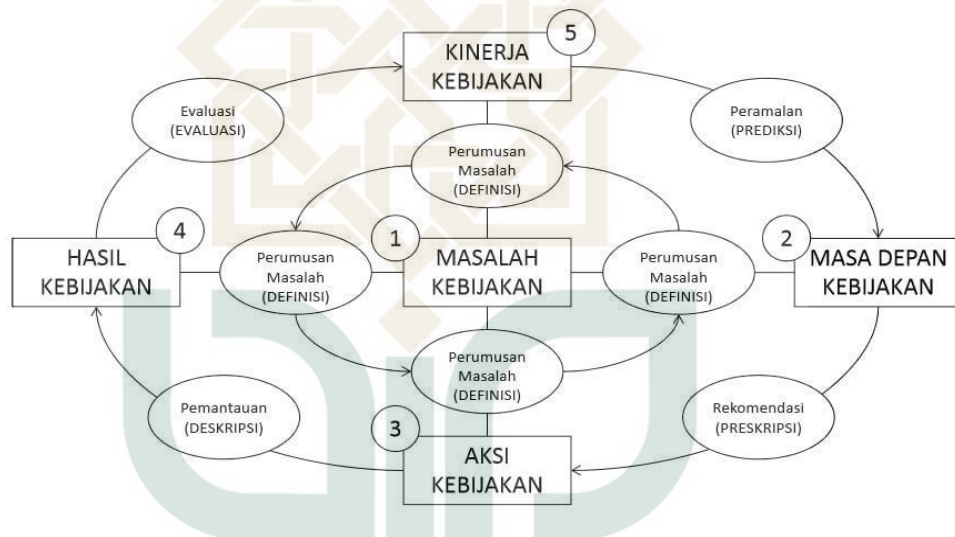
Informasi yang relevan dengan kebijakan berupa isu kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang biasa

²⁸ William N. Dunn, *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.Pdf*, 2003.

²⁹ F.R.S. S. Chandrasekhar and jurusan teknik mesin Laily Noor Ikhsanto, "2020-Permenag Nomor 30 Tahun 2020," *Liquid Crystals* 21, no. 1 (2020): 1–17.

digunakan dalam memecahkan masalah manusia, yaitu : definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Setiap informasi kebijakan dikaitkan dengan proses kebijakan. Dunn menggunakan diagram berikut untuk menggambarkan lebih jelas hubungan antara lima informasi dan lima prosedur kebijakan yang dirumuskan sebagai analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah :

Analisis kebijakan berorientasi masalah



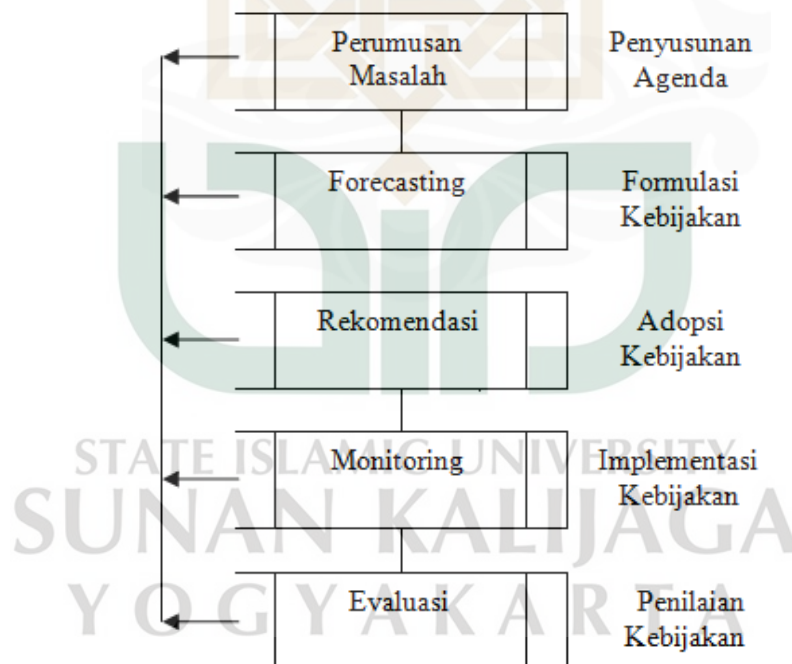
Gambar 1. Analisis Kebijakan William N. Dunn

Perumusan masalah (definisi) adalah upaya mengumpulkan informasi tentang suatu masalah kebijakan, Peramalan (prediksi) berisi informasi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan. Rekomendasi (preskripsi) memberikan informasi tentang kegunaan dari konsekuensi di masa mendatang dari pemecahan masalah. pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang

konsekuensi implementasi saat ini dari penerapan kebijakan. Evaluasi menyediakan informasi mengenai kegunaan dari pemecahan suatu masalah.³⁰

3. Tahap pengambilan kebijakan

Dalam tahapan pembuatan kebijakan selalu disertai dengan prosedur analisis kebijakan, yang dimulai dengan perumusan masalah, peramalan (prediksi), rekomendasi, pemantauan serta evaluasi. Prosedur analisis ini digunakan untuk mengubah *scientific information* menjadi *policy relevant information*. Berikut ini proses pengambilan kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn sebagai berikut :



1. Tahap penyusunan agenda

Tahapan ini disebut juga dengan penyusunan agenda (agenda setting).

Penyusunan agenda kebijakan ini diawali dari suatu masalah yang muncul

³⁰ William N. Dunn, *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.Pdf*, 2003.

di masyarakat. Masalah ini dapat diungkap oleh seseorang sebagai masalah pribadi (private problem), kemudian berkembang menjadi masalah umum (public problem) selanjutnya masalah tersebut menjadi isu kebijakan (policy issue).

2. Formulasi kebijakan (Forecasting)

Formulasi kebijakan atau forecasting adalah kegiatan untuk menentukan informasi factual tentang situasi dimasa depan atas dasar informasi yang ada sekarang. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausible, potensial, dan secara normative bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan dari berbagai pilihan.³¹

3. Adopsi kebijakan

Masalah yang telah dijadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan. Dalam proses pemilihan alternative kebijakan membutuhkan perhatian yang cermat agar policy maker tidak terjebak pada pilihan yang hanya untuk kepentingan pribadi tertentu.

4. Implementasi kebijakan

³¹ William N. Dunn. *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.Pdf*, 2003

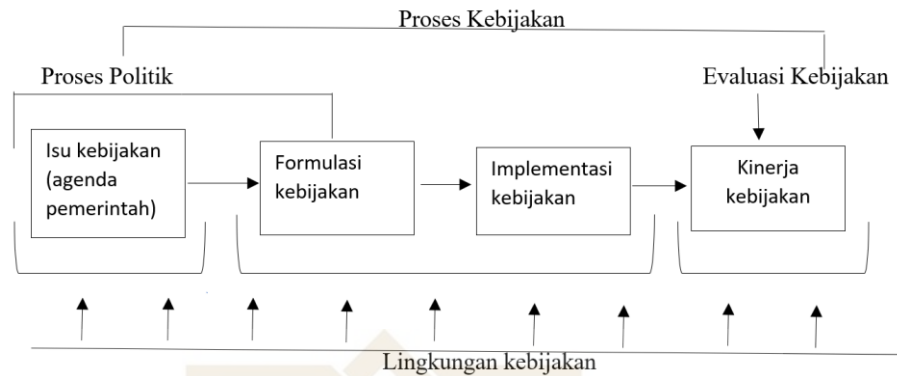
kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.

5. Evaluasi kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dapat dilakukan jika kebijakan sudah berjalan cukup waktu dan tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi.

Thomas Dye menggambarkan proses kebijakan ke dalam enam tahap yaitu, *Problem identification, agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, dan policy evaluation.*

Dari kedua Model yang dikembangkan oleh para ilmuwan kebijakan di atas mempunyai satu tujuan akhir yaitu evaluasi. Namun demikian terdapat satu proses yang sama bahwa model formal dari proses kebijakan yang ada adalah dari “gagasan kebijakan”, “formulasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, baru kemudian menuju kinerja atau prestasi yang diharapkan setelah diadakannya evaluasi kinerja kebijakan, seperti yang dijelaskan pada gambar proses kebijakan ideal berikut ini :



Gambar 2 Proses Kebijakan Ideal

4. Bentuk-bentuk analisis

Menurut Dunn dalam dijelaskan analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Menurut Dunn, analisis kebijakan hadir dalam tiga bentuk, yaitu:³²

a. Analisis Kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif adalah kebijakan yang mengarahkan penelitiannya pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan itu diterapkan. Model ini biasa disebut model prediktif.

b. Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap konsekuensi dari kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini sering disebut sebagai model evaluatif.

c. Analisis kebijakan integratif

³² B A B Ii and A Deskripsi Teori, "William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), Cet. Ke-IV, 95-97.," a.n.d., 95-97.

Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

Bentuk-bentuk analisis kebijakan diatas memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu pada analisis kebijakan prospektif bentuk analisis mengarah pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan itu diterapkan. Sedangkan bentuk analisis kebijakan retrospektif hanya memusatkan kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan itu diterapkan. Maka analisis kebijakan yang paling tepat menggunakan bentuk kebijakan integratif, yaitu dengan memadukan antara analisis prospektif dan retrospektif.

Dari berbagai penjelasan diatas secara umum, penelitian analisis kebijakan berfokus pada tiga aspek, ketiga fokus ini adalah pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan. Tiga poin kunci, yaitu:³³

- 1) Masalah Sosial
- 2) Implementasi Kebijakan
- 3) Konsekuensi kebijakan

Dengan berfokus pada tiga hal di atas, proses analisis kebijakan pada penelitian ini akan berusaha untuk mendefinisikan masalah yang akan menjadi fokus kajian yang akan ditanggulangi oleh kebijakan. Setelah masalah itu ditentukan maka analisis kebijakan bertanggung

³³ Ismail Nawawi, *Public Policy, Strategi, Advokasi, Teori, dan Praktek* (Surabaya, 2009).

jawab mengidentifikasi strategi yang sesuai dengan masalah sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kebijakan yang telah disusun dan diterapkan tentunya akan memiliki konsekuensi berupa akibat-akibat. Konsekuensinya bisa positif dan/atau negatif. Untuk itulah, analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan memprediksi akibat sesudah kebijakan itu diimplementasikan.

5. Gaya Analisis Kebijakan

Menurut Leslie A. Pal dalam Joko terdapat tiga macam gaya analisis kebijakan (*style of policy analysis*), yaitu analisis deskriptif, analisis proses, dan analisis evaluasi.³⁴

a. Analisis Deskriptif (*descriptive Analysis*)

Analisis ini dibagi dua, yaitu :

- 1) Analisis isi (*Content Analysis*) merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan, terutama pada maksud, definisi masalah tujuan dan orientasi sebuah kebijakan.
- 2) Analisis Sejarah (*Historical Analysis*) merupakan analisis yang menekankan pada awal mula (sejarah) pembuatan kebijakan hingga implementasinya.

b. Analisis Proses (*Proses Analyst*)

Analisis proses memfokuskan pada ketepatan dalam proses politik dan faktor dari luar yang kompleks dalam pembentukan suatu kebijakan,

³⁴ Adityas Putra Rama Wibowo et al., "Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Aplikasi Android Untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan di Dinas Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta," *Kebijakan Publik Deliberatif* 1 (2010): 232.

bukan hanya pada isi kebijakan. Gaya analisis proses meyakini bahwa kebijakan adalah suatu usaha yang layak untuk pemecahan suatu kebijakan, dapat dianalisis mulai dari perumusan masalah, siapa yang terlibat dalam penyusunan, dan metode apa yang digunakan dalam pengambilan kebijakan.

c. Analisis Evaluasi (*Evaluation Analysis*)

Gaya analisis berfokus pada penggambaran tingkat penilaian yang didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi kebijakan dan karakteristik etis, berikut penjelasannya :

- 1) Evaluasi logis tidak hanya menggambarkan tapi menganalisis isi kebijakan secara detail, pada evaluasi logis berfokus pada beberapa dimensi yaitu menilai konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan dan menilai perbedaan antara konsekuensi kebijakan yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.
- 2) Evaluasi empiris bertujuan untuk melihat dan menilai apakah kebijakan yang diterapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada, dalam arti luas menganalisis efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan. Oleh karena itu, dalam analisis ini berusaha untuk menilai dampak yang dihasilkan dari kebijakan, apakah sesuai dengan tujuan kebijakan.
- 3) Evaluasi etis, yang menganalisis pada etika, norma dan nilai yang telah ada, yaitu tentang benar salah analisis dampak dalam

menggambarkan bahwa akibat dari kebijakan melanggar prinsip-prinsip moral.

Dari ketiga gaya analisis kebijakan diatas dapat disimpulkan pentingnya analisis kebijakan dalam setiap tahapannya merupakan suatu hal yang krusial karena kegagalan sebuah kebijakan disebabkan oleh beberapa kesalahan yaitu dalam tahapan perumusan masalah, kesalahan dalam implementasi maupun dalam evaluasi kebijakan. Dalam penelitian mengenai Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* digunakan model analisis deskriptif dan analisis evaluasi yaitu melakukan analisis mengenai sejarah kebijakan, isi kebijakan dan implementasi kebijakan yang kemudian dianalisis mengenai bagaimana efisiensi dan efektifitas serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan, untuk mengukur apakah kebijakan sudah berjalan sesuai dengan tujuan.

6. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dianggap sangat penting dalam proses kebijakan, karena sebaik apapun suatu kebijakan dirumuskan, jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka tidak akan membawa dampak atau tujuan yang diinginkan. Ripley dan franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang memberikan kekuatan, kebijakan, manfaat atau jenis output yang aktual pada suatu

program. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh para birokrat pembuat kebijakan.³⁵

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai perilaku yang dilakukan pemerintah maupun swasta berupa individu maupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan kebijakan. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan bagi pembuat kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan. Rumusan lain yang dikemukakan oleh Merille S.Grindle bahwa implementasi kebijakan bergantung pada isi kebijakan dan konteks dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses perwujudan kebijakan publik dari kebijakan yang bersifat abstrak (peraturan yang terdapat dalam undang-undang) menjadi bentuk yang lebih nyata yaitu berupa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan yang sudah direkomendasikan untuk diimplementasikan oleh pemangku kebijakan tidak menjadi jaminan akan

³⁵ Agus Purwanto Erwan and Ratih Sulistiyastuti Dyath, "Implementasi Kebijakan Publik._Pdf.Pdf," no. September (2018): 8–9, www.gavamedia.net.

kepastian keberhasilan implementasinya, karena banyak variabel yang mempengaruhi dapat berupa penghambat maupun pendukung.³⁶

b. Model - model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasinya kebijakan publik dikenal menggunakan beberapa model, antara lain :

1) Model Gogin

Implementasi dalam model ini perlu mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal dalam implementasi yaitu bentuk dan isi kebijakan, kemampuan organisasi dengan sumber daya dalam mendukung implementasi, dan pengaruh masyarakat sebagai pelaku kebijakan, dapat berupa karakteristik, motivasi dan pola komunikasi.

2) Model Grindle

Model implementasi yang mengaitkan antara tujuan kebijakan dan hasilnya, hasil kebijakan yang dicapai dipengaruhi oleh kepentingan dibuatnya kebijakan, jenis dan manfaat yang akan dihasilkan, perubahan dari hasil kebijakan, letak pengambilan pelaksanaan program dan sumber daya yang dilibatkan, Pengaruh lainnya dapat berupa lingkungan.

3) Model Meter dan Horn

³⁶ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 7–8, <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.

Enam faktor yang mempengaruhi model Meter dan Horn, yaitu : (1) Standar kebijakan dan sasaran dari kebijakan (2) Sumber daya pendukung implementasi (3) Komunikasi internal organisasi dan aktivitas pengukuran untuk menilai tujuan yang akan dicapai (4) Karakteristik organisasi yang akan mempengaruhi tingkat berhasil atau tidaknya suatu program (5) Kondisi sosial ekonomi dan politik (6) Sikap pelaku kebijakan dalam memahami kebijakan yang ditetapkan.

4) Model George Edwards III

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah tahap dalam pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi pelaksana kebijakan yang dipengaruhinya. Suatu kebijakan dikatakan gagal jika kebijakan tersebut kurang dalam pengimplementasiannya. Implementasi tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Empat faktor yang memberi pengaruh dalam keberhasilan maupun kegagalan menurut Edward III:

- a) Komunikasi yaitu mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan itu harus disampaikan dengan jelas, akurat, dan konsisten. Faktor komunikasi sebagai acuan dalam pelaksana kebijakan tahu benar apa yang akan dikerjakan.
- b) Sumber daya (*Resource*) sangat berperan penting sebagai personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan,

apabila peraturan sudah dibuat dengan baik namun sumber daya tidak terpenuhi maka implementasinya tidak efektif (Widodo;2011: 98)

- c) Sikap pelaksana (*Diposition*) pelaksana implementasi harus siap dan memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan. Sikap mendukung atau menolak sangat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan.
- d) Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, setiap birokrasi memiliki prosedur yang berbeda, pada pemerintah pusat dan daerah pasti ada perbedaan dalam birokrasinya. Maka diperlukan Standar Operating Prosedur (SOP) untuk menyamakan tindakan pelaksana kebijakan.³⁷

Dalam penelitian ini penulis cenderung mengacu pada teori implementasi George C. Edward III karena lebih memfokuskan pada efektifitas implementasi kebijakan dengan fokus kepada variabel komunikasi dan variabel sumber daya. Pada teori Merille S. Grindle cenderung menitikberatkan pada konteks implementasi kebijakan, strategi dan efisiensi khususnya menyangkut pada implementor, sasaran dan konflik yang mungkin terjadi serta sumber daya yang diperlukan dalam

³⁷ Chatarina Sitoesmi Triwiniastuti and Wahyu Sabatini, "Implementasi Program Ujian Nasional Di Sma Negeri," *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 6, no. 1 (2019): 54–63, <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p54-63>.

implementasi. Sedangkan teori Van Meter dan Van Horn lebih spesifik dalam menekankan kepada kinerja kebijakan.³⁸

7. Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan*

Wathani

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menerapkan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* yang merupakan salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Kebijakan ini merupakan bentuk penilaian akhir pada proses pembelajaran pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Pendidikan Diniyah Formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada pendidikan formal sesuai dengan ciri khas pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. Saat ini ada tiga jenjang pdf yaitu :³⁹

- a. PDF jenjang Pendidikan Dasar (Pendidikan Diniyah Formal ‘Ula), terdiri dari 6 tingkat sederajat dengan SD/MI, dan PDF Wustha terdiri atas 3 tingkat sederajat dengan SMP/MTS.
- b. PDF jenjang Pendidikan Menengah berbentuk PDF Ulya, terdiri dari 3 tingkat sederajat dengan SMA/MA
- c. PDF jenjang Pendidikan Tinggi berupa Ma’had Aly untuk program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3)

³⁸ Djoko Suhartono Parlindungan, Wijaya Kusuma, “Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Kubu Raya,” *Pmis Untan Paian*, 2013, 1–13.

³⁹ Abdul Wahid, “Pendidikan Diniyah Formal Wajah Baru Pendidikan Pesantren Untuk Kaderisasi Ulama’,” *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam - SYAIKHUNA* 7, no. 2 (2016): 299–300, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3078>.

Kurikulum yang dikembangkan pada PDF yaitu 25 persen untuk pendidikan umum yang terdiri dari Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, untuk tingkat Ulya ditambah dengan Seni Budaya. Sedangkan untuk Pendidikan Keagamaan Islam Berbasis Kitab Kuning (Kutub Al-Turats) mendapat porsi 75 persen dari seluruh beban pelajaran, meliputi Al-Qur'an, Tauhid, Akhlak-Tasawuf, Nahwu-Sharaf, Balaghah, Ilmu Kalam, Tafsir-Ilmu Tafsir, Bahasa Arab, Tarikh, Hadist-Ilmu Hadits, Fiqh-Ushul Fiqh, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Falak yang semuanya berbasis kitab dan berbahasa Arab.⁴⁰

Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* juga merupakan salah satu syarat kelulusan dari satuan pendidikan diniyah formal. Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinyatakan bahwa santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan, dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan diniyah formal, dan penilaian oleh Menteri.⁴¹ Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, penilaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*. Bagi santri yang telah menyelesaikan masa belajarnya dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal

⁴⁰ Wahid, "Pendidikan Diniyah Formal Wajah Baru Pendidikan Pesantren Untuk Kaderisasi Ulama'," 289.

⁴¹ Dalinama Telaumbanua, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," no. 006344 (2019), <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.

Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dapat menerima ijazah resmi yang dijamin oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengenai kesederajatannya dengan tingkat pendidikan formal lainnya.⁴²

Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada jenjang akhir santri PDF yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran, untuk jenjang PDF Ulya materi yang diujikan Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadits-Ilmu Hadits, Fiqh-Ushul Fiqh, Bahasa Arab dan Nahwu-Shorof. Sedangkan untuk PDF Wustha materi yang diujikan adalah Tafsir, Hadits, Fiqh, Bahasa Arab dan Nahwu-Shorof. Mata pelajaran ini dipilih dengan alasan untuk tetap menjaga tradisi keilmuan pesantren. Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* merupakan salah satu bentuk penilaian yang ada pada Sistem Pendidikan Nasional, Anthony J.Nitko (1996 ; 4) "*assessment is a broad term defined as a process for obtaining information that is used for making decisions about students, curricula and programs, and educational policy*" dijelaskan bahwa penilaian adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang peserta didik, kurikulum, program yang sudah dijalankan, dan kebijakan pendidikan.⁴³ Menurut Ralph Tyler penilaian merupakan sebuah

⁴² Dalinama Telaumbanua. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," no. 006344 (2019), <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.

⁴³ Zainal Arifin, *Menganalisis Kualitas Tes, Evaluasi Pembelajaran*, 2012, 7–8.

proses pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana, dan bagaimana tujuan pendidikan dicapai.⁴⁴

Dari data yang dimiliki Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* telah dilaksanakan selama 5 tahun dimulai sejak 2018, Direktur Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly Waryono mengemukakan mengenai jumlah peserta pertama pada 1438 H/2018 M hanya diikuti 827 santri. Pada tahun berikutnya diikuti 2.185 santri. Dijelaskan bahwa selama dua tahun pertama diadakan yaitu 2018 dan 2019 sistem ujian menggunakan metode *Paper Based Test*. Sejak 1440 H/2020 M, Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* digelar dengan metode campuran yaitu *Paper Based Test* dan *Computer Based Test* dengan peserta 3.500 santri. Kemudian, pada 1441 H/2021 M terjadi peningkatan peserta hingga mencapai 5.044 santri. Bisa kita lihat terjadi peningkatan jumlah peserta dan model yang digunakan setiap tahunnya, diharapkan dengan terus diadakan evaluasi dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* semakin meningkatkan kualitas pendidikan formal di Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ Rina Novalinda, Ambiyar Ambiyar, and Fahmi Rizal, "Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented," *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 18, no. 1 (2020): 137, <https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1644>.

⁴⁵ Subdit Pendidikan Diniyah dan M'had Aly, "Laporan Penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* Tahun 2021 M/1442 H" (Jakarta, 2021).

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai informasi tentang bagaimana Analisis Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dalam Pendidikan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif, karena dianggap mampu memahami realitas sosial secara mendalam.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2003) bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga metode kualitatif dianggap mampu membantu mendeskripsikan bagaimana analisis kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dalam sistem pendidikan nasional.⁴⁶

Menurut Lexy j. Moleong (2007) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang kejadian yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi,

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2007).

motivasi, tindakan.⁴⁷ Dengan kata lain metode kualitatif mengutamakan kemampuan yang dimiliki peneliti dalam mendalami fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memerlukan keterangan langsung dari narasumber mengenai keadaan yang berkaitan dengan subjek maupun objek penelitian.

Pendekatan kualitatif adalah dengan cara pengumpulan data berupa kata-kata tertulis maupun ucapan secara lisan serta sikap dari narasumber. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. dalam hal ini penting peneliti untuk mendiskripsikan secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun hasil temuan yang diperoleh akan dihubungkan berdasarkan kerangka berfikir yang ada sehingga dapat ditentukan apakah akan ada temuan baru atau hanya muncul hasil yang akan melengkapi pada kajian sebelumnya.

2. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peneliti berusaha mengamati kejadian atau fenomena yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Alasan memilih model ini adalah subjek dan objek tentang analisis kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* ini di Kementerian Agama Republik Indonesia dimana kebijakan ini dibuat dan diatur sehingga peneliti harus berinteraksi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang

⁴⁷ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2007).

dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan deskripsi Patton (2002), studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu. Metode ini dianggap mampu menangkap kompleksitas permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini.

Lebih lanjut lagi pendekatan studi kasus merupakan salah satu metode dari penelitian kualitatif yang dianggap mampu memberikan studi mendalam dan mendetail tentang suatu kasus baik perorangan, kelompok, program, organisasi, budaya, agama, daerah atau bahkan Negara. Dengan memahami suatu kasus secara mendalam maka peneliti dapat menangkap arti penting kasus yang dibahas bagi kepentingan masyarakat organisasi atau komunitas tertentu.⁴⁸ Sehingga dalam penelitian ini metode studi kasus digunakan sebagai upaya untuk menjelaskan kasus mengenai analisis kebijakan dalam Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* ini. Penelitian studi kasus ini berfokus kepada analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan solusi dari masalah dan dampak dari diadakannya kebijakan ini.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pembuat dan

⁴⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasaran Indoensia., 2010).

pelaksana kebijakan mengenai Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*. Waktu Penelitian dimulai pada bulan Desember 2022 sampai 28 Februari 2023 .

4. Subjek Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif terdapat istilah subjek penelitian. Menurut Suliyanto (2018:19) penelitian kualitatif adalah penelitian yang di dasari oleh data kualitatif, dimana data yang ada bisa berbentuk angka, bilangan maupun pernyataan-pernyataan dalam kalimat. Subjek penelitian kualitatif biasa disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁹

Sebagai upaya dari pengumpulan data maka sumber data primer berasal dari informan yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memberikan pertimbangan dalam menentukan sumber data.⁵⁰ Menurut Herdiansyah (2014) metode ini berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang telah dipertimbangkan. Yang dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.⁵¹ Adapun kriteria yang dapat menjadi sampel yaitu 3M (mengetahui, memahami, dan mengalami).⁵²

⁴⁹ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁵¹ H Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Salemba Hu (Jakarta, 2014).

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

Dalam penentuan subjek penelitian diperlukan syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu: informan cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti, terlibat penuh dalam kegiatan yang sedang diteliti dan memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi.⁵³ Berdasarkan jenis sampel yang dipilih, maka ditetapkan beberapa narasumber pada penelitian. Peneliti menetapkan karakteristik subjek dalam penelitian “Analisis Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*” Informan yang dipilih adalah Kepala Sub Direktorat Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly, Bapak Drs. Nurul Huda, M.Ag yang menjabat menjadi Kasubdit PDMA sejak 2021 bulan Agustus, dalam hal ini Kasubdit sebagai penanggung jawab penuh atas jalannya kebijakan UAPDFBN/IW. Sub Koordinator Seksi Kurikulum Bapak Drs. Ahmad Rusdi, M.Pd selaku ketua panitia pelaksanaan UAPDFBN/IW, Sub Koordinator Seksi Kesantrian Bapak DR. Biltizer Bachtiar, Ic, MA dalam hal ini sebagai data pembanding atas data yang diperoleh pada informan lain. Dan Sub Koordinator Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan pada Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly Winuhoro HB,ST, ME, M.Si(Han) selaku penanggungjawab sarana dan prasarana pada lembaga Pendidikan Diniyah Formal.

⁵³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan dalam prosedur dalam mendapatkan informasi yang digunakan dalam penelitian. Data adalah komponen penting dalam penelitian, karena dengan data dapat mengetahui hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Dalam hal ini Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang pada umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu studi dokumentasi, observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

a. Observasi

Observasi dilakukan agar peneliti memperoleh data berupa perilaku, kegiatan, dan tindakan dari objek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang didapatkan secara langsung melalui pengamatan dan pancaindra. Dalam melakukan observasi, peneliti terjun langsung dan melakukan pengamatan di Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Metode observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, kegiatan, pelaku, waktu, tempat, tujuan dan perasaan. Jenis observasi yang dilakukan adalah *participant observe*, yaitu peneliti ikut secara langsung dalam melakukan kegiatan.

Kegiatan yang diikuti antara lain Koordinasi Simulasi CBT UAPDFBN/IW di Hotel Padjajaran Bogor, kegiatan Finalisasi Soal UAPDFBN/IW 2023 di hotel Mega City Hotel Bekasi, serta kegiatan magang selama 3 bulan di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI untuk ikut serta melakukan persiapan UAPDFBN/IW 2023. Peneliti mengamati bagaimana kebijakan itu berjalan, kegiatan observasi ini paling efektif dilakukan karena untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dan bertukar informasi antara dua orang yaitu pewawancara dan yang di wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang artinya adanya pengajuan beberapa pertanyaan secara terstruktur dan detail mengenai fokus permasalahan. Teknik ini mendukung penggalian informasi yang mendetail dari informan, yang berisikan pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.⁵⁴ Penulis menggunakan teknik ini untuk memahami bagaimana realisasi dari program UAPDFBN/IW serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

⁵⁴ Basuki Sulistya, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

Wawancara dilakukan dengan model semi terstruktur yang berarti proses wawancara terjadi secara terbuka, tapi peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang memudahkan peneliti dalam menggali informasi tanpa keluar dari tema. Untuk menentukan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mempertimbangkan pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan subjek orang yang telah cukup lama dan terlibat penuh pada Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*.

Wawancara dilakukan pada bulan Februari 2023 di Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Berikut informan dari penelitian ini, Kepala Sub Direktorat Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly, Bapak Drs. Nurul Huda, M.Ag, Sub Koordinator Seksi Kurikulum Bapak Drs. Ahmad Rusdi, M.Pd selaku ketua panitia pelaksanaan UAPDFBN/IW, Sub Koordinator Seksi Kesantrian Bapak Dr. Biltizer Bachtiar, Ic, MA, Dan Sub Koordinator Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan pada Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly Winuhoro HB, ST, ME, M.Si(Han) selaku penanggungjawab sarana dan prasarana pada lembaga Pendidikan Diniyah Formal. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan sejarah, latarbelakang, implementasi hingga dampak apa saja yang muncul setelah kebijakan ini diterapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data yang bersumber pada buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, foto, laporan, jurnal ilmiah, website-website berita baik yang bersifat primer maupun sekunder maupun Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian yang mendukung hasil wawancara. Sifat dari metode ini adalah tidak ada keterbatasan pada ruang dan waktu sehingga banyak peluang peneliti untuk mengetahui hal-hal yang ada di waktu silam. Data dokumen difokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* ini diterapkan.

Data berbentuk dokumen yang digunakan mencakup Petunjuk Teknis UAPDFBN/IW 2022 dan 2023, Peraturan Menteri Agama Nomor 30, 31, 32 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Keputusan Direktur Jendral mengenai Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum, Laporan Penyelenggaraan UAPDFBN/IW tahun 2021 dan 2022, data hasil koordinasi pada acara Koordinasi Simulasi UAPDFBN/IW dan Koordinasi Finalisasi Soal UAPDFBN/IW, jurnal dan website terkait. Data dari dokumen yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mendeskripsikan keseluruhan data yang dikumpulkan dalam penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Data yang dianalisis berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang menjelaskan bahwa analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan.⁵⁵ Prosedur dalam teknik analisis ini memiliki empat langkah yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).⁵⁶ Berikut merupakan proses analisis data yang dilakukan:

a. Pengumpulan Data (*data collection*)

Proses pengumpulan data dilakukan dengan pertama-tama mengumpulkan informasi hasil observasi, dokumen dan memastikan informan sesuai dengan kriteria penelitian. Peneliti memastikan bahwa semua pengamatan dan dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengamatan dilakukan langsung di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, sedangkan untuk informan dipastikan yang mengetahui, memahami dan mengalami.

b. Kondensasi Data (*data condensation*)

⁵⁵ J. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed)*, 2014 (United States of America: Sage Publications, Inc., n.d.).

⁵⁶ J. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (USA: Sage Publications, 2014).

Dalam tahap kondensasi data dilakukan proses menyeleksi, memfokuskan, meringkas, menyederhanakan dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip pada lapangan⁵⁷. Dengan demikian data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran atau pola yang lebih jelas untuk memahami keterkaitan data yang diperoleh antara satu dengan lainnya, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Pemilihan (*Selecting*)

Peneliti dituntut selektif, yaitu dengan memilih dan menentukan dimensi mana yang lebih penting dan memahami informasi mana yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.⁵⁸ Selain itu peneliti mengumpulkan data dari transkrip wawancara informan, artikel jurnal dan memisahkan berdasarkan topik pembahasan terutama mengenai analisis kebijakan pendidikan dan digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

2) Pengerucutan (*Focusing*)

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk dari pra-analisis. Dalam tahap ini peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan

⁵⁷ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (USA: Sage Publications, 2014).

⁵⁸ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (USA: Sage Publications, 2014).

masalah dalam penelitian.⁵⁹ Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yang memberikan batasan pada seleksi data yang dilakukan.

3) Peringkasan (*Abstracting*)

Usaha dalam membuat rangkuman yang memastikan inti, proses dan pernyataan-pernyataan dalam penelitian tetap terjaga di dalamnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dievaluasi lagi oleh peneliti terutama dalam hal kualitas dan kecukupan data. Setelah data yang dikumpulkan dianggap baik dan jumlahnya cukup, maka data tersebutlah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

4) Penyederhanaan dan Transformasi (*data Simplifying dan Transforming*)

Data dalam proses ini kemudian disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara dengan berbagai cara yang dianggap mampu membuat peneliti lebih paham ketika menganalisis data.

c. **Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang telah disimpulkan sesuai dengan latar belakang masalah sehingga dapat dibuat kesimpulan. Pada penelitian ini penyajian data yang digunakan

⁵⁹ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (USA: Sage Publications, 2014).

adalah teks tulisan yang bersifat naratif yang digunakan untuk menyajikan hasil wawancara informan. Hasil dari temuan yang ada pada lapangan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan teori analisis kebijakan yang dianggap dapat memecahkan masalah penelitian ini.

d. Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Langkah terakhir dari teknik analisis ini adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pengambilan keputusan merupakan proses interpretasi data yang sudah dilakukan oleh peneliti. Peneliti menarik kesimpulan dari analisis dan implementasi kebijakan dari hasil data dan narasi yang telah disusun. Sehingga dari proses-proses yang telah dilakukan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah ini. Kesimpulan yang ada masih perlu diverifikasi dengan meneliti dan melihat kembali kondensasi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

7. Uji Validitas Data

Uji validitas data adalah proses pengujian kebenaran data yang diperoleh. Data yang dianggap valid adalah data yang tidak ada perbedaan antara data yang disimpulkan peneliti dengan data yang ada di lapangan.⁶⁰

Untuk mendapatkan keabsahan data digunakan metode triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kevalidan suatu data dengan

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

memanfaatkan sesuatu diluar data untuk kebutuhan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang dihasilkan.⁶¹ Triangulasi diperlukan sebagai penentu keabsahan karena informasi yang diterima bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber data dan teknik. Triangulasi sumber data pada penelitian ini dengan mencari informasi dari informan lain tentang keabsahan data yang diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara objektif. Sedangkan triangulasi teknik adalah proses pengecekan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya peneliti melakukan pengecekan kembali hasil data dilapangan dengan data hasil dokumentasi menggunakan beberapa teknik yang berbeda, sehingga ditarik kesimpulan yang objektif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini, akan merumuskan dalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lain sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori serta metode penelitian. Latar belakang masalah memberikan gambaran mengenai kondisi di lapangan serta alasan peneliti mengambil judul penelitian ini. Rumusan masalah bertujuan untuk memberikan batasan-batasan utama dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dan manfaat

⁶¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2007).

penelitian, serta telaah pustaka digunakan untuk mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu yang sejenis. Kerangka teori berisi teori yang sesuai dengan topik penelitian. Pada metode penelitian berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab II Gambaran Umum

Menjelaskan mengenai kondisi umum Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama Republik Indonesia yang terdiri dari sejarah, visi, misi, struktur organisasi, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kondisi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian inti penelitian ini, yaitu penjelasan terkait hasil penelitian yang mengacu pada butir-butir pertanyaan pada rumusan masalah berkaitan dengan analisis kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana latar belakang adanya kebijakan, bagaimana implementasi kebijakan dan dampak apa saja yang muncul ketika kebijakan ini dilakukan.

Bab IV Penutup

Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dari penelitian yang dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah sosial yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan UAPDFBN/IW adalah belum adanya ijazah yang bisa dijadikan bukti kompetensi lulusan Satuan PDF yang diakui negara maupun khalayak umum, agar memudahkan lulusan dalam melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan, Perlunya standarisasi pendidikan pada PDF agar tidak ada penyelewengan ketika berjalannya pembelajaran dalam pesantren
2. Implementasi kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar nasional/*Imtihan Wathani* dilaksanakan dengan baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan diperlukan evaluasi dalam pelaksanaannya, berikut hasil implementasi yang diperoleh :
 - Bentuk komunikasi oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan baik dalam pembuatan petunjuk teknis, sosialisasi yang berjenjang dan penyebaran informasi melalui media sosial.
 - Sumber daya dalam implementasinya terpenuhi dari segi kebutuhan SDM, sedangkan sumber daya berupa sarana dan prasarana masih dibawah standar layak sekolah formal, dalam segi kualifikasi SDM butuh peningkatan karena SDM yang terlibat kebanyakan dikarenakan oleh mutasi jabatan sehingga belum sepenuhnya

menguasai pengelolaan pelaksanaan kebijakan UAPDFBN/IW dalam aspek manajerial.

- Sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan UAPDFBN/IW adalah positif dan mendukung karena para implementor mempunyai harapan untuk pelaksanaan kebijakan berjalan sebaik mungkin.
- Sisi Birokrasi, tersedia petunjuk teknis pelaksanaan UAPDFBN/IW. Berdasarkan hasil temuan, struktur birokrasi pada instansi pemerintahan tidak mengalami hambatan. Kemudian dalam pelaksanaannya selalu mengikutsertakan seluruh elemen yang dibutuhkan sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan UAPDFBN/IW dari segi struktur birokrasi berjalan secara efektif.

3. Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak terdapat kendala-kendala dalam penyelenggaraan UAPDFBN/IW, maka diperlukan evaluasi sehingga dapat menjadi perbaikan untuk pelaksanaan UAPDFBN/IW pada tahun-tahun berikutnya.
4. Konsekuensi positif dari adanya kebijakan UAPDFBN/IW dari sisi santri adalah santri memiliki kepercayaan diri karena setelah mengikuti UAPDFBN/IW mereka mendapat ijazah. Sedangkan dampak untuk pembuat kebijakan adalah sebagai tolak ukur atas sejauh mana kemampuan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada pada Satuan Pendidikan Diniyah Formal. Konsekuensi negatifnya adalah munculnya beberapa kendala dan masalah yang harus diperbaiki dalam setiap pelaksanaan kebijakan UAPDFBN/IW.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran Teoritis

Pembahasan mengenai analisis Kebijakan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani* dalam penelitian ini perlu diuji kembali dan di pertajam pisau analisisnya, masih banyak hal yang bisa digali. Dapat dilakukan pemetaan yang lebih mendetail bentuk analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori lain.

2. Saran Praktis

a. Sarana dan Prasarana

1. Ketidakstabilan jaringan internet dapat diatasi dengan menggunakan jaringan internet yang lebih kuat dengan menambah *bandwidth* atau lebih baik menggunakan *dedicated*.
2. Kantor Wilayah Kemenag Provinsi/Pusat memberikan perhatian terhadap jaringan internet untuk lembaga yang masih susah mengakses jaringan.
3. Untuk penggunaan Laptop/Pc lebih disarankan menggunakan jaringan LAN daripada WIFI.
4. Kemenag Kanwil/Pusat memberikan perhatian untuk pengadaan Laptop/PC bagi lembaga satuan PDF untuk kelancaran pelaksanaan UAPDFBN/IW.

b. Sumber Daya

1. Dilakukan pengembangan kompetensi terhadap staff yang terlibat dalam kebijakan UAPDFBN agar memenuhi kualifikasi dan kebutuhan dalam kebijakan ini.
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan diniyah formal yang belum memiliki kemandirian dan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran.
3. Kurangnya tenaga ahli teknis Informasi dan Teknologi (IT) sehingga perlunya penambahan teknisi di setiap lembaga dan diberikan pelatihan terhadap tenaga teknisi IT yang ada di setiap Satuan Pendidikan Diniyah Formal.

C. Kata Penutup

Diperoleh pemaparan, analisis dan kesimpulan dari penelitian diatas. Maka skripsi ini telah selesai sebagai tugas akhir studi peneliti. Ucapan rasa syukur kepada Allah atas kelancaran sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Biltizer. "Hasil Wawancara Dengan Sub Koordinator Seksi Kesantrian Pada Subdit PDMA." *Di Direktorat Jenderal Pendidikan Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI*. Pada tanggal 21 Februari Pukul 13.30, 2023.
- Bayu, Dimas. "Data Pesantren per April 2022." *DataIndonesia.id*, 2022. <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/indonesia-miliki-26975-pesantren-ini-sebaran-wilayahnya>.
- Carter V. Good. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Alfabeta, 1977.
- Ditjen Pendidikan ISLAM, Sekertaris. "Integrasi Data Emis Kemenag Dan Dapodik Kemendikbud Tahun 2021." *Kementerian Agama RI*. 2021.
- Herdiansyah, H. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Hu. Jakarta, 2014.
- Huda, Nurul. "Hasil Wawancara Dengan Kasubdit Pendidikan Diniyah Dan Ma'had Aly." *Di Direktorat Jenderal Pendidikan Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI*. Pada Tanggal 23 Februari Pukul 16.30, 2023.
- Humas Kemenag RI. "Regulasi Jangan Sampai Matikan Pendidikan Islam." *Kementerian Agama RI*, 2014. <https://kemenag.go.id/nasional/regulasi-jangan-sampai-matikan-pendidikan-islam-wj4m2t>.
- Ilyas, Mukhlisuddin. "Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (2016): 469–84. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5937>.
- Indahri, Yulia, Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Dpr Ri, Jl Jenderal, and Gatot Subroto. "Asesmen Nasional Sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional National Assessment as a Choice of Evaluation to National Education System." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* / 12, no. 2 (2021): 2614–5863. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>.
- Kemenag. "Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren," 2020.
- Kemenag RI. "Qur'an Kemenag." *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "PMA No 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren - Penelusuran Google," 2020.
- KURNIAWAN, U C U. "Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (Pdf) Di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru," 2020. [http://repository.uin-suska.ac.id/29644/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29644/1/TESIS UCU KURNIAWAN OK.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/29644/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29644/1/TESIS%20UCU%20KURNIAWAN%20OK.pdf).
- Laksono, Agung. "Hasil Koordinasi Simulasi CBT IUAPDFBN/IW." *Di Padjajaran Suites Resort & Convention Hotel Bogor*, 2022.

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed)*. 2014. United States of America: Sage Publications, Inc., n.d.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2007.
- Muhammad, Zuhdi. "Modernization of Indonesia Islamic Schools' Curricula, 1945-2003." *Internasional Journal of Inclusive Education, Vol.10, No. 4-5*, n.d., 415–27.
- Nasir, H.M. Ridwaln. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Nawawi, Ismail. *Public Policy, Strategi, Advokasi, Teori, Dan Praktek*. Surabaya, 2009.
- Nilan, P. "The 'Spirit of Education' in Indonesia Pesantren." *British Journal of Sociology of Education* Vol. 30, N (n.d.): 219–32.
- Novalinda, Rina, Ambiyar Ambiyar, and Fahmi Rizal. "Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented." *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 18, no. 1 (2020): 137. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1644>.
- Parlindungan, Wijaya Kusuma, Djoko Suhartono. "Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Kubu Raya." *Pmis Untan Paian*, 2013, 1–13.
- Pendidikan Diniyah dan M'had Aly, Subdit. "Laporan Penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/Imtihan Wahani Tahun 2022 M/1433 H." *Di Direktorat Jenderal Pendidikan Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI*. 2022.
- . "Laporan Penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/Imtihan Wathani Tahun 2021 M/1442 H." Jakarta, 2021.
- Pendidikan Islam, Direktur Jenderal. *Dokumen Petunjuk Teknis Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal*, Pub. L. No. 4412 (2022).
- Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly, Subdit. "Simulasi Pendataan Sistem Rekapitulasi Subdit PDMA." 2023.
- pesantren, Pendidikan. "Bentuk Persetujuan Rekomendasi Direktur Jenderal Ali Ramdhani." 2022, 2022. <https://youtu.be/6HpAdsNuIwI>.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran Indoensia., 2010.

- Rusdi, Ahmad. "Hasil Wawancara Dengan Sub Koordinator Seksi Kurikulum." *Di Direktorat Jenderal Pendidikan Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI*. Pada tanggal 20 Februari Pukul 13.00, 2023.
- "Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia," n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Suyanto. "Manajemen Penjenjangan Pendidikan Diniyah Formal Pada Pesantren Di Kota Bengkulu." *Jurnal An-Nizom* 1, no. (2) (2007): 66–77.
- Syukron, Ahmad, Samsudi Samsudi, and Kustiono Kustiono. "Pendidikan Diniyah Formal : A Formal Curriculum for Pesantren in Indonesia." *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology* 9, no. 2 (2020): 63–71. <https://doi.org/10.15294/ijcet.v9i2.36645>.
- Telaumbanua, Dalinama. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," no. 006344 (2019). <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.
- Triwiniastuti, Chatarina Sitoresmi, and Wahyu Sabatini. "Implementasi Program Ujian Nasional Di Sma Negeri." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 6, no. 1 (2019): 54–63. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p54-63>.
- Wahid, Abdul. "Pendidikan Diniyah Formal Wajah Baru Pendidikan Pesantren Untuk Kaderisasi Ulama'." *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam - SYAIKHUNA* 7, no. 2 (2016): 292 – 302. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3078>.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Edited by dan Indro Basuki wahyudi Sutiono, Yuyut Setyorini. Pertama. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- William N. Dunn. *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.Pdf*, 2003.
- Winuhoro. "Hasil Wawancara Dengan Sub Koordinator Seksi Sarpras Dan Kelembagaan Pada Subdit PDMA." *Di Direktorat Jenderal Pendidikan Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI*. Pada tanggal 24 Februari 2023, 2023.
- Zaenal, Afandi. "Strategi Pendidikan Entrepreneurship Di Pesantren Al-Mawaddah Kudus." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2019, 55–69.
- Zaini Tamin. "Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren; Satu Analisis Filosofis." *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–21. <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2978>.

Zulkhairi, Teuku. "Pendidikan Diniyah Formal (Pdf) Meningkatkan Mutu Pendidikan Dayah Tradisional Di Aceh FORMAL DINIYAH EDUCATION (PDF) IMPROVE THE QUALITY OF TRADITIONAL DAYAH EDUCATION IN ACEH" 19, no. 2 (2021). <http://jurnaledukasikemenag.org>.

———. *Pendidikan Diniyah Formal Di Dayah Tradisional*. Edited by Sabrin. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2002.

